

KEBIJAKAN PUBLIK DALAM UPAYA PENANGGULANGAN COVID-19 DI DESA LANDUNGSARI

by ODNIEL ERDIANTO MALO

Submission date: 09-Dec-2021 06:40PM (UTC-0800)

Submission ID: 1607920213

File name: L_ERDIANTO_MALO_Kebijakan_Publik1111_-_Odnier_Erdianto_Malo.docx (51.24K)

Word count: 1055

Character count: 7286

**KEBIJAKAN PUBLIK DALAM UPAYA PENANGGULANGAN COVID-19
DI DESA LANDUNGSARI**

3
SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana

ADMINISTRASI PUBLIK



Disusun oleh:

ODNIEL ERDIANTO MALO

2017210110

3
KONSENTRASI KEBIJAKAN PUBLIK

PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS TRIBHUWANA TUNGGADDEWI

MALANG

2021

RINGKASAN

Kebijakan publik sangat dibutuhkan untuk menyelesaikan sebuah permasalahan ditengah masyarakat, kebijakan publik bisa berupa aturan-aturan, himbauan atau ajakan dari pemerintah kepada masyarakat. Kebijakan publik ialah segala yang dijalankan maupun tidak dijalankan dari Pemerintahan. Bersamaan adanya kebijakan publik dapat menimbulkan manfaat yang baik bagi rakyat. Jenis penelitian yang dipakai didalam penelitian disini ialah menggunakan metode penelitian kualitatif, teknik pengumpulan data melalui 3 metode yaitu, dokumentasi, wawancara, observasi, teknik penentuan informan yaitu menggunakan *purposive sampling*. Dalam menguji keabsahan data peneliti menggunakan teknik triangulasi data. Hasil dalam penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan yang diterapkan di Desa Landungsari dalam menangani virus ini yaitu berupa penyemprotan disinfektan, operasi masker, pembagian masker dan penyediaan tempat cuci tangan diberbagai tempat.

Kata Kunci: Kebijakan Publik, Penanggulangan Covid-19

PENDAHULUAN**1.1 LATAR BELAKANG**

Penggunaan sebuah kebijakan ialah tugas terpenting akan sebuah keberlanjutan pemerintahan, karenanya kecakapan serta pengetahuan perancang kebijakan terhadap suatu proses rancangan kebijakan sangatlah utama bagi tercapainya kebijakan yang efisien, cepat, dan tepat. Kecakapan serta pengetahuan terhadap proses perancangan kebijakan juga harus dibarengi dengan pengetahuan dari pembuat kebijakan terhadap wewenang yang dipunya. Kebijakan publik adalah setiap keputusan yang dibuat oleh pemerintah baik dari tingkat pusat maupun tingkat terendah atau badan/lembaga/organ supra-negara.

Pengambilan sebuah kebijakan sangat diperlukan untuk menyelesaikan atau memecahkan sebuah permasalahan yang ada dimasyarakat, pembuatan kebijakan tentunya dilakukan oleh pemerintahan dalam suatu periode tertentu karena tidak selamanya pemerintahan yang sama dapat secara terus-menerus membuat dan mengambil kebijakan untuk diterapkan. Tentunya sebuah kebijakan tidak serta merta diputuskan dan diterapkan melainkan harus melalui beberapa tahapan dan juga proses yang terlebih dahulu harus dilalui mulai dari agenda setting, formulasi, legitimasi, implementasi dan terakhir yaitu evaluasi kebijakan.

Lembaga Administrasi Negara menjelaskan arti kebijakan publik sebagai landasan yang wajib dijadikan pegangan, pedoman bagi setiap usaha serta kegiatan aparatur pemerintahan, agar tercapai keterpaduan dan kelancaran dalam mencapai suatu tujuan.

Dari beberapa pandangan dan pendapat di atas, istilah kebijakan memiliki arti dan makna yang kompleks, artinya kebijakan dapat diartikan sebagai sesuai dengan situasi, kondisi, serta persepsi orang yang akan menggunakan istilah kebijakan tersebut.

¹ Implementasi kebijakan secara sederhana dirumuskan oleh Wahab (1997: 64) dalam Anggara (2016: 530) sebagai suatu proses melaksanakan keputusan kebijakan, yang biasanya dalam bentuk undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan peradilan, perintah eksekutif, atau dekrit Presiden. Selanjutnya, Wahab juga mengemukakan beberapa pandangan dari sudut pandang Pressman dan Wildavsky yang menyatakan bahwa kata kerja mengimplementasikan itu sudah sepantasnya terkait langsung dengan kata benda kebijakan. Oleh karena itu, kajian implementasi kebijakan perlu mendapat perhatian saksama.

Lebih lanjut Makmur dan Thahier dalam Setyawan (2017: 86) menjelaskan bahwa materi kebijakan haruslah sesuai dengan apa yang diatur sehingga tercapailah keteraturan dan ketertiban berbagai aktivitas masyarakat yang tercakup didalamnya, baik antar masyarakat itu sendiri maupun masyarakat dengan lingkungan sekitarnya.

Yuliana (2020) ditahun 2020 kali ini dunia dipusingkan dengan merebaknya virus Covid-19 dimana hampir seluruh negara berlomba-lomba dalam hal menanggulangi virus ini berbagai macam cara pun sudah ditempuh demi meminimalisir penyebarannya. Harirah & Rizaldi (2020) Virus Covid-19 ialah virus baru yang tingkat penularan sangat cepat serta tingkat kematian yang diakibatkan oleh virus ini terbilang cukup tinggi.

Yunus dan Rezki (2020) ⁹ Coronavirus adalah kelompok virus yang dapat menyebabkan penyakit pada mamalia, serta burung, bahkan manusia sekalipun dapat terkena virus ini. ¹⁵ Virus ini dikonfirmasi pertama kali muncul di Kota Wuhan China, merebaknya virus ini diseluruh Dunia membuat banyak orang khawatir sekaligus resah. Bahkan wabah ini seakan tidak menemuhi titik habisnya dengan dilaporkannya penambahan pasien yang setiap harinya terus bertambah.

Agar penyebarannya tidak terus meluas dan bertambah, negara-negara yang terkena dampak virus tersebut mulai memberlakukan system *lockdown* dan/atau PSBB. Di Indonesia sendiri merujuk pada surat keputusan Kemenkes RI Nomor HK.01.07IMENKES/305/2020 tertanggal 11 Mei 2020 dalam mengurangi jumlah sebaran dari virus ini sejumlah daerah di Indonesia yang terpapar dampak cukup parah dari virus tersebut sudah memberlakukan PSBB.

Harirah & Rizaldi (2020) ² hingga saat ini jumlah pasien yang terkonfirmasi positif virus Covid-19 meningkat signifikan. Tercatat hingga tanggal 30 September 2020 jumlah kasus positif dari covid-19 di Indonesia berjumlah 287.008 kasus yang tersebar di 34 Provinsi, terhitung sejak pengumuman pasien pertama pada tanggal 2 maret 2020.

Desa Landungsari merupakan wilayah yang berada di Kabupaten Malang yang terkena dampak Covid-19 sehingga memaksa Pemerintah Daerah Kabupaten Malang untuk melakukan ¹⁴ pembatasan sosial berskala besar (PSBB) oleh karena itu dibutuhkan sebuah langkah antisipasi agar virus ini tidak terus menyebar luas mengingat Desa Landungsari merupakan kawasan padat penduduk kos baik mahasiswa maupun parah buruh atau pekerja yang mencari nafkah, sehingga sangat

memungkinkan terjadinya penyebaran virus Covid-19 akibat perpindahan masyarakat dari berbagai daerah. Desa Landungsari juga memiliki sebuah pasar tradisional dimana pasar ini juga bisa menjadi tempat penyebaran dari virus Covid-19 akibat dari aktivitas jual beli yang melibatkan banyak masyarakat.

Untuk itu dibutuhkanlah sebuah kebijakan publik yang diharapkan dapat memutus atau menghentikan rantai penyebaran dari virus Covid-19. Tentunya kebijakan yang diambil tidak serta merta diimplementasikan dengan begitu saja diperlukan beberapa pertimbangan dan kajian guna kebijakan yang diambil benar-benar dapat terimplementasikan dengan baik, sehingga dapat memutus penyebaran dari virus tersebut.

Berdasarkan paparan yang sudah dijelaskan di atas, peneliti berniat untuk melakukan penelitian dengan judul **“Kebijakan Publik Dalam Upaya Penanggulangan Covid-19 Di Desa Landungsari, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang”**

⁷ 1.2 Rumusan Masalah

Dari latar belakang di atas, rumusan masalah yang diambil dalam penelitian ini ialah sebagai berikut:

1. Bagaimana kebijakan pemerintah Desa Landungsari dalam upaya penanggulangan covid-19?
- ⁵2. Faktor-faktor yang menjadi pendukung dan penghambat dalam implementasi kebijakan pemerintah Desa Landungsari dalam upaya penanggulangan covid-19?

¹ 1.3 Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah di atas, tujuan penelitian dalam penelitian ini ialah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui kebijakan pemerintah Desa Landungsari dalam upaya penanggulangan covid-19.
- ⁵2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi pendukung dan penghambat dalam implementasi kebijakan pemerintah Desa Landungsari dalam upaya penanggulangan covid-19.

⁴ 1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian yang ingin dicapai dari penelitian ini ialah sebagai berikut:

1. Bagi peneliti

Penelitian dapat menambah wawasan dan pemahaman peneliti khususnya mengenai kebijakan pemerintah Desa Landungsari dalam upaya penanggulangan Covid-19. Serta dapat mengimplementasikan ilmu yang diperoleh selama dibangku perkuliahan untuk diterapkan di dunia pekerjaan

2. Bagi Pemerintah Desa Landungsari

Penelitian ini diharapkan menjadi bahan masukan serta bahan evaluasi dalam penanganan virus Covid-19 di Desa Landungsari

3. Bagi peneliti selanjutnya

Penelitian dapat digunakan menjadi bahan acuan saat melakukan penelitian dengan tema yang serupa.

KEBIJAKAN PUBLIK DALAM UPAYA PENANGGULANGAN COVID-19 DI DESA LANDUNGSARI

ORIGINALITY REPORT

29%

SIMILARITY INDEX

29%

INTERNET SOURCES

10%

PUBLICATIONS

16%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

| | | |
|---|--|----|
| 1 | repository.ummat.ac.id Internet Source | 8% |
| 2 | jurnal.unsyiah.ac.id Internet Source | 3% |
| 3 | rinjani.unitri.ac.id Internet Source | 3% |
| 4 | 123dok.com Internet Source | 2% |
| 5 | Mulyono Yalia. "Evaluasi Kebijakan Program Mobile Pusat Layanan Internet Kecamatan (MPLIK)", Jurnal Penelitian Komunikasi, 2013 Publication | 2% |
| 6 | repository.uinsu.ac.id Internet Source | 2% |
| 7 | digilib.unimed.ac.id Internet Source | 2% |
| 8 | www.neliti.com Internet Source | 1% |

| | | |
|----|---|-----|
| 9 | Submitted to Universitas Musamus Merauke Student Paper | 1 % |
| 10 | etheses.iainpekalongan.ac.id Internet Source | 1 % |
| 11 | vbook.pub Internet Source | 1 % |
| 12 | docplayer.info Internet Source | 1 % |
| 13 | ejournal.ipdn.ac.id Internet Source | 1 % |
| 14 | ilmate.kemenperin.go.id Internet Source | 1 % |
| 15 | ngovee.com Internet Source | 1 % |

Exclude quotes Off

Exclude matches Off

Exclude bibliography Off

KEBIJAKAN PUBLIK DALAM UPAYA PENANGGULANGAN COVID-19 DI DESA LANDUNGSARI

PAGE 1

PAGE 2

PAGE 3

PAGE 4

PAGE 5

PAGE 6

PAGE 7

PAGE 8
